

KETEGANGAN FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN SERTA UPAYA ASEAN DALAM MENGATASINYA

Lisbet*

Abstrak

Pada 10 Desember 2023 telah terjadi insiden tabrakan antara kapal sipil Filipina dan kapal Penjaga Pantai China. Akibatnya, suplai pasokan yang diangkut oleh kapal sipil Filipina tidak dapat dikirimkan ke garnisun kecil Tentara Filipina. Tulisan ini menganalisis perkembangan situasi di Laut China Selatan yang kerap diwarnai ketegangan dan upaya ASEAN untuk mengatasinya. Insiden tabrakan antara kapal China dan kapal Filipina sudah beberapa kali terjadi selama tahun 2023. Kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Namun, baru kali ini tindakan China tersebut membuat kerusakan mesin yang serius pada salah satu kapal pasokan Filipina sehingga kapal tersebut harus ditarik kembali ke pelabuhan karena tidak dapat menyelesaikan misinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan di Laut China Selatan perlu mengajak negara ASEAN lainnya untuk tidak melupakan persoalan yang terjadi di perairan yang dipersengketakan tersebut dan berkontribusi dalam menjaga kondusivitasnya.

Pendahuluan

Sengketa teritorial di Laut China Selatan telah berlangsung lama dan melibatkan China serta beberapa negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Ketegangan di Laut China Selatan kembali terjadi pada hari Minggu, 10 Desember 2023. Insiden tabrakan terjadi antara kapal Filipina dan kapal Penjaga Pantai China.

Kapal Filipina saat itu sedang dalam misi mengirimkan suplai pasokan ke garnisun kecil Tentara Filipina di *Second Thomas Shoal*, sebuah atol di Kepulauan Spratly.

Selain itu, kapal Penjaga Pantai China juga mencegah kapal-kapal Filipina yang mengantarkan perbekalan dan paket hadiah Natal untuk para militer dan nelayan Filipina ke Karang Ayungin, Pulau

* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, email: lisbet.sihombing@dpr.go.id.



Patag dan Pulau Lawak. Emman Hizo, Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Filipina mengatakan, koalisi memutuskan untuk mengalihkan jalur ke Palawan (Kompas, 12 Desember 2023). Kapal-kapal Atin Ito, yang melakukan pengiriman paket Natal tersebut, terus diikuti oleh kapal Penjaga Pantai China sehingga situasi tidak aman. Akibatnya paket-paket Natal tidak jadi diantar ke ketiga pulau di Laut Cina Selatan tersebut.

Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly serta ketiga titik tersebut berada di dalam zona sengketa Laut China Selatan. Sementara itu, China mengklaim bahwa hampir semua bagian dari Laut China Selatan, termasuk perairan dan kepulauan di sekitar negara tetangga sebagai miliknya. China juga tidak memedulikan keputusan pengadilan Mahkamah Internasional PBB tahun 2016 yang menyatakan bahwa *Second Thomas Shoal* di Kepulauan Spratly masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (kontan.co.id, 12 Desember 2023). China menyebutkan, klaim Filipina tersebut tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, China mengirim kapal patroli ke Laut China Selatan dan telah membangun pulau-pulau buatan yang diisi para tentara China untuk memperkuat klaimnya. Ketegangan antara Filipina dan China di Laut China Selatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada stabilitas keamanan di Kawasan ASEAN. Tulisan ini menganalisis perkembangan situasi ketegangan di Laut China Selatan dan upaya ASEAN untuk mendorong penyelesaian secara damai.

Ketegangan di Laut China Selatan

Selama tahun 2023, telah beberapa kali terjadi insiden di Laut

China Selatan yang melibatkan China dan Filipina. Pada tanggal 13 Februari 2023, Kapal Penjaga Pantai China telah menembakkan sinar laser berkekuatan tinggi ke arah Kapal Malapascua milik Penjaga Pantai Filipina yang sedang melakukan patroli. Pada 5 Agustus 2023, Kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air terhadap kapal Penjaga Pantai Filipina di Ayungin Shoal. Pada waktu itu, Kapal Penjaga Pantai Filipina sedang mengawal Kapal Pengangkut Kendaraan Perang di Era Perang Dunia Kedua, Sierra Madre.

Insiden tabrakan antara kapal Filipina dengan Kapal Penjaga Pantai China pada 10 Desember 2023 ini semakin memperkeruh persoalan perebutan klaim di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina menuding Penjaga Pantai China menggunakan meriam air untuk menghalangi tiga Kapal Pemerintah Filipina yang sedang mengirim persediaan kepada para nelayan di dekat *Scarborough Shoal* di sekitar Pulau Luzon. Kapal Penjaga Pantai dan Milisi Maritim China telah mengganggu, memblokir, dan melakukan manuver yang membahayakan keselamatan awak Kapal Filipina bahkan menyebabkan kerusakan pada Kapal Pengirim Pasokan Sipil Filipina yang sedang melakukan misi suplai resmi. Kapal penjaga Pantai China di dekat *Scarborough Shoal* juga menggunakan perangkat akustik jarak jauh yang bisa merusak pendengaran. Alat tersebut digunakan untuk menimbulkan ketidaknyamanan sementara yang parah dan melumpuhkan para awak Kapal Filipina serta mengusir kapal-kapal Penangkap Ikan Filipina.

Selain itu, satu dari dua kapal yang membawa pasokan sudah 'ditabrak' satu Kapal Penjaga

Pantai China. Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan Filipina juga melaporkan bahwa Kapal-kapal Penjaga Pantai China juga menyemprotkan meriam air kepada dua kapal pembawa suplai dan satu kapal penjaga pantai Filipina yang mengawal mereka (Kompas, 12 Desember 2023). Akibat dari tindakan ini, mesin dari satu kapal suplai rusak berat, begitu pula dengan tiang layar dari kapal penjaga pantai.

Juru Bicara Penjaga Pantai China Gan Yu membenarkan insiden tabrakan tersebut (Kompas, 12 Desember 2023). Menurutnya, pihaknya telah berlaku sesuai dengan aturan dalam membela kedaulatan wilayah China. Penjaga pantai China hanya melakukan tindakan serupa karena ada kapal asing yang dianggap memasuki perairan di bawah kekuasaan China. Penjaga Pantai China balik menuding bahwa Kapal Filipina yang 'sengaja menabrak' Kapal Penjaga Pantai China setelah 'berulang kali tidak memedulikan peringatan', sehingga menurut China, Filipina yang harus bertanggung jawab. Kapal Filipina tiba-tiba mengubah arah secara berbahaya dan tidak profesional, lalu menabrak kapal penjaga pantai China yang sedang melakukan tugas penegakan hukum rutin dan mengakibatkan kerusakan ringan.

Tindakan China ini tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap keselamatan dan mata pencaharian warga Filipina, tetapi juga terhadap hukum internasional. Mahkamah Internasional pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa wilayah Laut China Selatan tersebut merupakan milik Filipina. Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2016 tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum bagi China dan Filipina.

Namun China tetap bersikeras bahwa 90% Laut China Selatan merupakan milik China berdasarkan sistem Sembilan Garis Putus-Putus.

Dampak dari berlarutnya ketegangan antara Filipina dan China dapat menimbulkan kemungkinan Dubes China akan diusir dari Filipina karena Pemerintah Filipina telah memanggil Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian. Selama menjabat sebagai Presiden Filipina, Ferdinand Marcos memang telah berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan menentang tindakan China. AS mendukung Filipina dalam menghadapi tindakan berbahaya dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh China.

AS juga telah meminta China untuk menghentikan tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas di Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan. Peringatan itu disampaikan setelah Kapal Filipina dan Kapal Penjaga Pantai China bertabrakan di Laut China Selatan. AS menyerukan agar China bersedia mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dan menghentikan tindakannya yang berbahaya dan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Dalam Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara AS dan Filipina mencakup adanya serangan bersenjata terhadap Angkatan Bersenjata Filipina, kapal atau pesawat terbang umum, termasuk milik Pasukan Penjaga Pantai Filipina di Laut China Selatan.

Upaya ASEAN

Persoalan perebutan klaim di Laut China Selatan telah berlangsung lama dan masih belum menemukan solusi damai. Padahal, untuk

menangani persoalan tersebut, ASEAN dan China telah membuat berbagai upaya, seperti menandatangani *Declaration on Conduct/DoC of The Parties in the South China Sea* pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi itu memuat komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.

Upaya ASEAN lainnya untuk mengatasi persoalan ini adalah China dan ASEAN kembali berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DoC (Declaration on Conduct/DoC of The Parties in the South China Sea)* pada tahun 2011 di Bali. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan *Regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* di Laut China Selatan. Fungsi dari kesepakatan ini adalah untuk menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan.

Upaya ASEAN dalam pembahasan sengketa Laut China Selatan antara ASEAN dan China saat ini sedang dalam tahap pembacaan kedua *Code of Conduct/CoC*. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat proses negosiasi CoC di Laut China Selatan. Komitmen ini dibuktikan dalam keberhasilan Indonesia mengajak China dan ASEAN pada pertemuan KTT ASEAN September 2023 untuk menyepakati bahwa CoC ditargetkan bisa selesai pada tahun 2026. Untuk itu, ASEAN menguatkan dukungan terhadap

anggotanya dengan cara mempercepat negosiasi Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan hanya dihadapi beberapa anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kendati demikian bukan berarti anggota ASEAN lainnya hanya berdiam diri, tetapi dapat bertugas untuk memediasi sengketa di Laut China Selatan, karena China juga merupakan mitra penting bagi ASEAN.

Selain mempercepat negosiasi, Indonesia juga berinisiatif untuk membentuk *guidelines* yang nantinya akan menjadi pedoman praktis meskipun di dalamnya tetap ada materi substantif untuk menjaga agar CoC dapat terus berjalan dengan efektif. *Guidelines* ini nantinya akan merangkum aspirasi ASEAN dan China melalui pembahasan secara intensif sehingga CoC diharapkan dapat menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip dan aturan internasional yang selaras dan berdasar pada hukum internasional, khususnya UNCLOS dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Khanisa Krisman, pengamat isu kawasan di Badan Inovasi dan Riset Nasional menjelaskan, gesekan Filipina dan China di Laut China Selatan ini menguji kekompakan ASEAN (Kompas, 12 Desember 2023).

Penutup

Ketegangan yang sering terjadi di Laut China selatan telah membuat khawatir negara-negara di Kawasan ASEAN yang mengharapkan terciptanya stabilitas keamanan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan di Laut China Selatan perlu mengajak negara ASEAN lainnya untuk tidak melupakan persoalan di Laut China Selatan.

Indonesia berharap negara-negara di Kawasan ASEAN lainnya juga bersedia untuk mempercepat negosiasi kode panduan (*Code of Conduct*) Laut China Selatan. Indonesia juga meminta kesediaan negara-negara ASEAN yang memiliki sengketa dengan China terkait persoalan sengketa di Laut China Selatan untuk melakukan negosiasi secara konstruktif dengan China, karena China merupakan salah satu mitra penting ASEAN. Parlemen negara-negara ASEAN, melalui AIPA, juga perlu terus mendorong negara-negara yg bersengketa di Laut China Selatan untuk mengedepankan dialog dan perundingan serta hukum internasional guna mengakhiri konflik teritorial di perairan tersebut.

Referensi

- “Alasan China & Filipina Kerap Berebut Perairan Dangkal di Laut China Selatan”, *kontan.co.id*, 12 Desember 2023, <https://internasional.kontan.co.id/news/alasan-china-filipina-kerap-berebut-perairan-dangkal-di-laut-china-selatan>, diakses 12 Desember 2023.
- “AS Desak Beijing Hentikan Tindakan ‘Berbahaya’ Di Laut Tiongkok Selatan”, *koran-Jakarta.com*, 11 Desember 2023, <https://koran-jakarta.com/as-desak-beijing-hentikan-tindakan-berbahaya-di-laut-tiongkok-selatan>, diakses 12 Desember 2023.

- “AS Dukung Filipina Soal Konflik Laut”, *Media Indonesia*, 12 Desember 2023, hal. 14.
- “Beragam Wajah China di Kawasan”, *Kompas*, 13 Desember 2023, hal. 4.
- “Isu Kawasan Uji Kekompakan ASEAN”, *Kompas*, 12 Desember 2023, hal. 4.
- “Laut China Selatan Kembali Memanas”, *Media Indonesia*, 11 Desember 2023, hal. 14.
- “Pantau Kapal Ilegal China di Laut China Selatan, Ini Langkah Filipina”, *kontan.co.id*, 4 Desember 2023, <https://internasional.kontan.co.id/news/pantau-kapal-ilegal-china-di-laut-china-selatan-ini-langkah-filipina>, diakses 12 Desember 2023.
- “Xi Jinping Lawan Pengaruh AS Vietnam”, *Media Indonesia*, 13 Desember 2023, hal. 14.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.